

ABSTRACT

This study focuses on the cash outlay information system as a control over cash flow so that there are no errors in the use of cash. The scope of this research is a public sector cash administration information system case study on the Peat Restoration Agency (BRG). The purpose of this research is to find out the description of the cash disbursement system in the newly formed body. The method used in this study uses a post-positivist approach. The post-positivist approach is used to gain an understanding of the cash disbursement process from the income and expenditure budget (APBN) by observing reality in the field related to the topic. The results show that government organizations that are less than 2 years old have gone well but there are still weaknesses in carrying out the cash disbursement system. The factors that influence it are: lack of experience, ineffective training, inadequate competence, uneven employee distribution, non-compliance with regulations, and unclear job analysis.



ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada sistem informasi pengeluaran kas sebagai kontrol atas cash flow agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan kas. Ruang lingkup penelitian ini adalah sistem informasi pengeluaran kas sektor publik (pemerintahan) studi kasus pada Badan Restorasi Gambut (BRG). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sistem pengeluaran kas pada badan yang baru dibentuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Pendekatan post-positivist digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses pengeluaran kas dari anggaran pendapatan dan belanja (APBN) dengan melakukan pengamatan realita di lapangan yang terkait dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan organisasi pemerintah yang berusia kurang dari 2 tahun sudah berjalan dengan baik namun masih ada kelemahan dalam menjalankan system pengeluaran kas. Faktor yang mempengaruhinya yaitu: kurangnya pengalaman, pelatihan belum efektif, kompetensi belum memadai, distribusi pegawai tidak merata, ketidakpatuhan pada peraturan, dan analisa jabatan yang belum jelas.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pengeluaran Kas Pemerintah

